

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Belajar merupakan kebutuhan setiap manusia yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dari kita dilahirkan hingga menjadi tua, kita telah banyak sekali melalui proses belajar untuk mampu menjadi manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan proses kehidupan yang sangat panjang. Kita tidak mampu hidup sebagai manusia jika kita tidak belajar maupun mendapatkan pelajaran. Hingga sampai kapan pun belajar merupakan kebutuhan vital yang mutlak ada pada setiap manusia. Maka dari itu kita sebagai manusia harus belajar secara terus menerus atau melaksanakan pembelajaran sepanjang hayat.

Pembelajaran sepanjang hayat atau *lifelong education* merupakan proses belajar yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Tidak hanya di lembaga pendidikan formal, pembelajaran sepanjang hayat dapat dilaksanakan di lembaga pendidikan non formal. Pembelajaran sepanjang hayat tidak terikat waktu dan usia. Walaupun manusia telah menyelesaikan pendidikan di lembaga formal, dia dapat terus belajar di manapun guna memperoleh pengetahuan yang semakin hari terus meningkat yang disebabkan tingginya perkembangan teknologi dan informasi saat ini. Pengertian *lifelong education* yang dikemukakan oleh Dave (dalam Skager 1979, hlm. 6) mengatakan bahwa:

*Lifelong education is a comprehensive concept which includes formal, non-formal and informal learning extended through the life-span of an individual to attain the fullset possible development in personal, social and professional life. It seek to view education in its totality and includes learning that occurs in the home, school, community, and workplace, and through mass media and other situation and structures for acquiring enlightenment.*

Dari pengertian di atas dijelaskan bahwa dalam pendidikan seumur hidup merupakan sebuah konsep belajar atau pembelajaran yang komprehensif yang

mencakup belajar formal, belajar non-formal dan belajar informal yang dapat dilakukan oleh setiap manusia dengan lama sesuai dengan rentang hidup seorang manusia untuk mencapai perkembangan dalam kehidupan pribadi, sosial dan profesional. Pembelajaran sepanjang hayat ini berusaha untuk melihat pendidikan berdasarkan totalitasnya dan termasuk pembelajaran yang dapat dilaksanakan dimana saja seperti di rumah, sekolah, masyarakat, dan tempat kerja serta pembelajaran dengan media massa, situasi, dan struktur lain guna memperoleh pengetahuan. Demi mencapai kebutuhan pendidikan, kita sebagai warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan pembelajaran sepanjang hayat. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dikemukakan bahwa pemerintahan Negara Indonesia antara lain berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa

Pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menetapkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Intinya pendidikan harus dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat guna mencapai terwujudnya hak untuk hidup. Kita hidup di negara ini haruslah menjadi manusia yang terdidik, yang dapat menjadi dasar tujuan agar manusia dapat memperoleh, mengakses dan menjalani kehidupannya lebih berarti sebagai seorang manusia. Namun terkadang dimasa sekarang, pendidikan hanya dapat dinikmati oleh sebagian masyarakat. Beberapa faktor yang dapat menjadi penghalang untuk memperoleh pendidikan formal khususnya dimasa sekarang yaitu adanya faktor ekonomi dan usia. Pada faktor ekonomi masih banyak warga negara yang secara materi belum cukup membiayayai kebutuhan untuk mengakses pendidikan. Masih banyak terdapat sekolah yang membatasi usia untuk individu dalam menjalani pendidikan, hingga yang cukup mendapat perhatian juga masih banyak kaum disabilitas yang masih kurang mendapatkan pendidikan.

Dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dijelaskan pada pasal 1, bahwa:

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:

- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental
- c. penyandang cacat fisik dan mental.

Dalam Undang-undang No. 4 tahun 1997 menegaskan bahwa penyandang cacat atau kaum disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Mereka juga mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Kaum disabilitas harus memperoleh pendidikan, yaitu dengan memberikan pendidikan khusus bagi setiap kaum disabilitas berdasarkan kelainan fisik yang dimilikinya.

Kaum disabilitas tunanetra yaitu mereka orang-orang yang memiliki keterbatasan pada indera penglihatan. Tunanetra atau *visual impairment* pada setiap manusia diperoleh dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang diperoleh sejak lahir, atau diperoleh pada saat mereka masih normal menjalankan kehidupan yang disebabkan adanya penyakit atau kecelakaan pada indera penglihatan. Dalam menjalankan kehidupan, mereka tentu mendapatkan kesulitan untuk mengakses pendidikan guna memperoleh pembelajaran. Kita harus ingat bahwa mereka mempunyai kedudukan yang sama serta mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Untuk kebutuhan pendidikannya maka mereka harus mendapatkan pendidikan yang khusus yang mampu memberikan akses pendidikan yang mudah bagi mereka kaum disabilitas (tunanetra).

Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 23 menjelaskan bahwa “pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.” Jelas yang terdapat dalam sistem pendidikan nasional, kaum disabilitas (tunanetra) harus mendapatkan pendidikan yang khusus. Dalam konteks pembelajaran sepanjang hayat, dimana dikatakan bahwa setiap manusia dapat melaksanakan pembelajaran dimanapun tanpa terikat waktu, usia dan hal-hal lainnya yang dapat menghambat pendidikan. Maka dari hal tersebut kaum disabilitas

(tunanetra) perlu mendapatkan kemudahan dalam akses untuk mendapatkan pendidikan.

Dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1997 pada pasal 10, dijelaskan bahwa kaum disabilitas harus mendapatkan aksesibilitas. Maksud dari aksesibilitas yaitu kemudahan yang disediakan bagi kaum disabilitas guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pemerintah dan warga negara tentunya harus memberikan kemudahan untuk mendapatkan fasilitas dan sarana prasarana dalam menunjang pendidikan serta dalam upaya memberikan kebutuhan informasi kepada kaum disabilitas (tunanetra). Salah satu fasilitas dalam menunjang proses pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat dalam aktivitas pemberian kebutuhan informasi kepada kaum disabilitas (tunanetra) yaitu salah satunya memfasilitasi mereka dengan perpustakaan.

Perpustakaan sebagai lembaga atau instansi yang mendukung pembelajaran sepanjang hayat harus selalu dapat melayani setiap warga negara guna memberikan informasi secara terus menerus sesuai perkembangan informasi saat ini dan masa yang akan datang. Perpustakaan dalam Undang-Undang Perpustakaan No.43 Tahun 2007 dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa:

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa perpustakaan termasuk elemen pokok dalam dunia pendidikan.

Perpustakaan harus selalu berusaha dan meningkatkan layanan dengan sebaik-baiknya yaitu dengan cara menyediakan bahan pustaka yang berkualitas yang mampu memenuhi kebutuhan pemustaka serta meningkatkan fasilitas lainnya yang terdapat di perpustakaan. Dengan memberikan layanan yang baik dan maksimal maka perpustakaan dapat di manfaatkan oleh pemustaka secara tepat dan berguna. Dalam memberikan aksesibilitas kepada kaum disabilitas (tunanetra), maka pemerintah serta badan swasta lainnya harus mampu menyediakan perpustakaan yang khusus dirancang bagi

meraka. Dengan memberikan koleksi yang mudah di akses dan layanan lainnya guna mencapai kebutuhan informasi yang diinginkan oleh para kaum disabilitas (tunanetra).

Sebagai fasilitas yang memberikan sumber informasi, tentunya perpustakaan harus mudah diakses oleh setiap warga negara, tanpa ada perbedaan. Untuk kaum disabilitas tentunya harus tersedia perpustakaan khusus dirancang bagi mereka untuk mempermudah mendapatkan informasi. Perpustakaan khusus menurut Undang-Undang No.43 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa “Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.”

Dalam aktivitas pendidikan ini guna meningkatkan pemanfaatan perpustakaan oleh pemustaka, perpustakaan harus menyelenggarakan pendidikan pemustaka. Kegiatan pendidikan pemustaka merupakan kegiatan yang sangat penting dilaksanakan di perpustakaan guna mencapai tujuan perpustakaan yaitu dalam memberikan jasa pelayanan kepada pemustaka. Kesuksesan pemustaka dalam memanfaatkan seluruh fasilitas dan koleksi perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan informasinya akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam pelaksanaan pendidikan pemustaka. Seperti yang kita ketahui bahwa informasi memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan, maka pemustaka yang memiliki *information literacy skill* yang baik akan berhasil dalam setiap tahapan bidang kehidupan yang dilaluinya.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah disebutkan dalam kompetensi kependidikan bahwa seorang kepala sekolah dan tenaga pengelola perpustakaan harus memberikan bimbingan literasi informasi kepada siswa tau pemustaka yang terdapat di sekolah. Menurut *American Library Association (ALA)* yang dikutip dalam artikel oleh Naibaho, (2007, hlm. 6) “*Information literacy* merupakan salah satu komponen penting yang harus dimiliki setiap warga dan berkontribusi dalam

mencapai pembelajaran seumur hidup.” Literasi informasi sangat berkaitan erat dengan melek informasi dan merupakan kunci dalam masyarakat informasi, masyarakat pengetahuan tentang pembelajar sepanjang hayat. Sehubungan dengan itu, pendidikan pemustaka ini harus diselenggarakan disemua perpustakaan guna memberikan keterampilan kepada pemustaka untuk dapat secara mandiri memanfaatkan koleksi, sarana dan prasarana perpustakaan, mampu menelusur informasi yang akurat, serta dapat berlangsung cepat. Menurut Lasa (2009, hlm. 241) dalam Kamus Kepustakawan Indonesia, mengenai pendidikan pemustaka ia mendefinisikan bahwa:

Pendidikan pemustaka adalah program yang diselenggarakan oleh perpustakaan untuk memberikan bimbingan, petunjuk maupun pendidikan, kepada calon pemustaka atau pemustaka dalam kegiatan mereka untuk memanfaatkan jasa informasi serta sarana perpustakaan. Misalnya katalog, computer, mikrofis, film mikro, maupun CDFROM. Bentuk pendidikan pengguna antara lain; ceramah, pelatihan, orientasi, selebaran, diskusi dan lainnya.

Pendidikan pemustaka merupakan cara pustakawan atau tenaga pengelola perpustakaan untuk bagaimana mengenalkan, membimbing, mengajarkan tentang perpustakaan kepada individu atau kelompok untuk mengetahui dan mampu memanfaatkan perpustakaan secara mandiri. Pendidikan pemustaka ini dapat diselenggarakan disemua lembaga perpustakaan. Perpustakaan tidak hanya berada di lingkungan sekolah atau lembaga formal saja, tetapi perpustakaan juga terdapat di lingkungan mereka yaitu orang-orang dengan berkebutuhan khusus atau kaum disabilitas (tunanetra).

Pendidikan pemustaka juga sangat perlu di terapakan di perpustakaan khusus yaitu perpustakaan braille. Mereka yang berkebutuhan khusus juga harus melek informasi, melek informasi bagi mereka yaitu penyandang tunanetra bukan harus melihat secara normal tetapi bagaimana mereka dapat mengenali tulisan atau makna dari informasi yang berkembang saat ini. Dengan adanya pembelajaran sepanjang hayat tersebut, maka perpustakaan untuk menunjang kegiatan literasi informasi tersebut harus menyelenggarakan pendidikan pemustaka. Hal ini sangat penting bagi perpustakaan agar mampu

membantu pemustaka lebih terampil dalam memanfaatkan perpustakaan secara mandiri.

Menurut kamus *The Little Oxford* (dalam Suharnan, 2012, hlm. 67) menyatakan bahwa “kemandirian atau *independent* dimaknai sebagai *self governing, not depending on something else or other person*. Di sini kemandirian dapat diartikan sebagai mengatur sendiri (tindakan-tindakan yang dilakukan), tidak bergantung pada orang lain.”

Kemandirian merupakan hal yang harus terdapat dalam diri setiap individu guna membantu dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari tanpa bergantung kepada orang lain. Kemandirian atau sikap mandiri yang terdapat pada setiap manusia tumbuh sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan dalam tahap kehidupan. Kemandirian seseorang dapat dibentuk melalui pendidikan dan pelatihan. Untuk dapat memanfaatkan perpustakaan secara mandiri tentu dapat dilakukan oleh perpustakaan dengan cara pendidikan pemustaka. Pendidikan pemustaka dilakukan guna mencapai tujuannya untuk memadirikan pemustaka dalam memanfaatkan fasilitas dan semua koleksi yang ada di perpustakaan dengan sebaik-baiknya.

Ada beberapa peneliti yang sudah melakukan penelitian tentang pendidikan pemustaka dengan objek yang berbeda-beda. Penelitian tentang pendidikan pemustaka sebelumnya pernah diteliti oleh A'yunin (2008) yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendidikan pemakai terhadap pemanfaatan perpustakaan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Yogyakarta I. Hasil penelitian yang didapatkan adalah terdapat pengaruh antara pendidikan pemakai terhadap pemanfaatan perpustakaan. Pengaruh pendidikan pemakai terhadap pemanfaatan perpustakaan di MTsN Yogyakarta 1 adalah berdampak positif dan masuk kategori signifikan sehingga dari hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan pendidikan pemakai yang dilaksanakan maka akan semakin baik pula pemanfaatan perpustakaan oleh pengguna perpustakaan.

Penelitian terdahulu yang lainnya yaitu oleh Ramayana (2013) yang meneliti tentang pengaruh pendidikan pemustaka terhadap perilaku siswa kelas X dan kelas XI dalam kegiatan akses temu kembali informasi di

Perpustakaan sekolah MAN Wonosari Gunungkidul. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa kegiatan pendidikan pemustaka di Perpustakaan MAN Wonosari Gunungkidul sangat berpengaruh terhadap perilaku siswa kelas X dan XI dalam kegiatan akses temu kembali informasi yang dibutuhkannya, dan teknik atau cara penelusuran yang digunakan oleh siswa juga masih manual yaitu menggunakan daftar klasifikasi dan juga secara *online* dengan OPAC (*Online Public Access Catalogue*).

Melihat beberapa penelitian yang sebelumnya telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat masalah mengenai program pendidikan pemustaka dan untuk membuktikan keefektifitasnya dalam perilaku yang ditunjukkan oleh pemustaka yaitu kemandirian pemustaka dalam pemanfaatan perpustakaan. Minat penulis untuk melakukan penelitian ini akan dilaksanakan di Perpustakaan Balai Penerbitan Braille Indonesia (BPBI) Abiyoso yang beralamatkan di dalam komplek Panti Sosial Binanetra (PSB) Wyata Guna, yang berada di Jalan Padjajaran No.52 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Perpustakaan Braille ini merupakan perpustakaan milik dari Balai Percetakan Braille (BPBI) Abiyoso yang sekarang ini lokasi kantor pusat terpisah dari perpustakaan yang berada di Jalan Kerkhof No. 21 Leuwihgajah Cimahi Selatan.

BPBI Abiyoso ini merupakan Departemen Sosial yang bertanggung jawab langsung ke Direktur Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Republik Indonesia melalui Direktur Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat. Tugas daripada Balai Penerbitan Braille Indonesia (BPBI) yaitu melaksanakan penyediaan bacaan bagi penyandang tunanetra, pengkajian dan penyiapan standarisasi sarana dan prasarana, pencetakan dan penerbitan buku-buku braille, pemberian informasi, mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bidang pemberian informasi, Perpustakaan Braille BPBI Abiyoso ini telah menyediakan sejumlah bahan koleksi yang hingga saat ini telah mencapai 900 eksemplar buku braille. Tidak hanya bahan koleksi berupa buku braille, di Perpustakaan Braille BPBI Abiyoso ini juga menyediakan



sarana dan prasarana yang telah menerapkan kecanggihan teknologi dan informasi yang sangat berkembang saat ini. Perpustakaan Braille BPBI Abiyoso ini telah menyediakan komputer dan *tape recorder* sebagai media untuk mengakses buku suara lengkap dengan sarana pendukung lainnya. Perkembangan teknologi dan informasi saat ini di Perpustakaan Braille BPBI Abiyoso telah terdapat jaringan internet atau *wifi* di dalam perpustakaan sehingga dapat dipergunakan oleh para pemustaka untuk mengakses informasi lainnya yang mereka butuhkan.

Untuk pengunjung perpustakaan ini yaitu mereka penyandang tunanetra yang sebagian besar berada di kompleks Panti Sosial Binanetra (PSB) Wyata Guna serta di kompleks ini juga terdapat sekolah formal yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB) A Bandung. Jumlah kunjungan pemustaka yang datang ke perpustakaan paling sedikit setiap harinya 7 orang. Diwaktu tertentu jumlah kunjungan pemustaka ke perpustakaan bisa mencapai 50 orang perhari.

Berdasarkan wawancara awal oleh penulis kepada pustakawan di Perpustakaan Braille Abiyoso Bandung ini didapatkan bahwa tenaga pengelola perpustakaan masih sangat sedikit. Terdiri dari 1 orang pustakawan dan 2 orang tenaga pengelola perpustakaan yang secara jumlah masih sangat kurang untuk dapat mengelola perpustakaan braille ini. Perpustakaan Braille Abiyoso Bandung ini merupakan perpustakaan braille yang lengkap di Indonesia khususnya di Kota Bandung ini, karena banyak pemustaka yang datang dari luar pulau untuk memperoleh koleksi braille yang dibutuhkan. Kurangnya tenaga pengelola perpustakaan terkadang tidak mampu untuk melayani secara maksimal pengunjung yang datang ke perpustakaan. Untuk itu diperlukan kemandirian pemustaka agar pemustaka mampu secara mandiri untuk dapat memanfaatkan layanan dan fasilitas perpustakaan secara maksimal tanpa bantuan orang lain.

Efektivitas merupakan salah satu unsur untuk mencapai tujuan atau target yang diinginkan dalam sebuah program yang telah direncanakan. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang telah ditentukan untuk mampu menyelesaikan tugas secara baik dan mencapai keberhasilan. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk melihat efektivitas pendidikan pemustaka yang akan

dilaksanakan oleh perpustakaan untuk meningkatkan kemandirian pemustaka tunanetra dalam pemanfaatan perpustakaan tersebut.

Sebagaimana latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini memilih judul **“Efektivitas program pendidikan pemustaka untuk meningkatkan kemandirian pemustaka tunanetra dalam pemanfaatan perpustakaan di Perpustakaan Braille Balai Penerbitan Braille Indonesia (BPBI) Abiyoso Bandung”**

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

### a. Masalah umum:

Bagaimanakah efektivitas program pendidikan pemustaka untuk meningkatkan kemandirian pemustaka tunanetra dalam pemanfaatan perpustakaan di Perpustakaan Braille BPBI Abiyoso Bandung?

### b. Masalah Khusus:

1. Bagaimanakah pelaksanaan program pendidikan pemustaka dalam pemanfaatan perpustakaan di Perpustakaan Braille BPBI Abiyoso Bandung?
2. Bagaimanakah gambaran kemandirian pemustaka tunanetra dalam pemanfaatan perpustakaan di Perpustakaan Braille BPBI Abiyoso Bandung?
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kemandirian pemustaka yang dibekali pendidikan pemustaka dengan kemandirian pemustaka yang dibekali informasi perpustakaan dalam pemanfaatan perpustakaan di Perpustakaan Braille BPBI Abiyoso Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program pendidikan pemustaka untuk meningkatkan kemandirian pemustaka tunanetra dalam pemanfaatan perpustakaan di Perpustakaan Braille

BPBI Abiyoso Bandung. Sedangkan tujuan khusus dari masalah yang di teliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program pendidikan pemustaka dalam pemanfaatan perpustakaan di Perpustakaan Braille BPBI Abiyoso Bandung.
2. Untuk mengetahui gambaran kemandirian pemustaka tunanetra dalam pemanfaatan perpustakaan di Perpustakaan Braille BPBI Abiyoso Bandung.
3. Untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara kemandirian pemustaka yang dibekali pendidikan pemustaka dengan kemandirian pemustaka yang dibekali informasi perpustakaan dalam pemanfaatan perpustakaan di Perpustakaan Braille BPBI Abiyoso Bandung.

#### **D. Manfaat penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangsi analisis bagi perkembangan disiplin ilmu Perpustakaan dan Informasi. Khususnya mengenai efektivitas program pendidikan pemustaka untuk meningkatkan kemandirian pemustaka tunanetra dalam pemanfaatan perpustakaan di Perpustakaan Braille BPBI Abiyoso Bandung.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai efektivitas program pendidikan pemustaka untuk meningkatkan kemandirian pemustaka tunanetra dalam pemanfaatan perpustakaan.
- b. Dapat dijadikan masukan bagi pemustaka agar dapat memanfaatkan Perpustakaan Braille BPBI Abiyoso Bandung dengan baik dan optimal secara mandiri
- c. Dapat dijadikan masukan bagi perpustakaan, khususnya kegiatan pendidikan pemustaka sebagai cara pelayanan untuk memberikan bimbingan tentang perpustakaan, sehingga pemustaka secara mandiri dapat memanfaatkan perpustakaan dengan baik dan optimal.

- d. Dapat dijadikan masukan bagi program studi agar dapat memberikan sumbangsih bagi disiplin ilmu perpustakaan dan informasi dalam mengembangkan pemanfaatan perpustakaan perpustakaan dan informasi.
- e. Dapat dijadikan masukan bagi bagi peneliti selanjutnya agar dapat dapat kreatif mengembangkan program pendidikan pemustaka sebagai program kegiatan di perpustakaan untuk meningkatkan pemanfaatan perpustakaan.

## **E. Struktur Organisasi Skripsi**

Dalam struktur organisasi skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan terdiri atas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi.

Bab II Kajian Teoritis terdiri dari kajian teori, kerangka pemikiran, asumsi, dan hipotesis penelitian. Kajian teoritis memaparkan tentang teori-teori yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian terdiri atas metode penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, prosedur penelitian, hasil pengujian instrumen, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian terdiri atas hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian yang berupa pemaparan data.

Bab V Kesimpulan terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi atau saran yang diberikan oleh penulis.